

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi sebagai suatu system yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 dan yang terbaru Undang-Undang No. 17 tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan koperasi seperti tersebut di atas, maka koperasi harus dikelola secara benar dan profesional. Pengelolaan koperasi yang profesional akan menjadi salah satu tolak ukur apakah koperasi termasuk ke dalam koperasi yang sehat atau tidak. Sebuah koperasi yang sehat akan melakukan pengelolaan secara profesional dalam semua bidang termasuk dalam bidang keuangan. Sebagai sebuah lembaga

ekonomi maka masalah akuntansi koperasi merupakan salah satu masalah terpenting yang ada di koperasi. Oleh karena itulah masalah akuntansi koperasi merupakan salah satu bagian dalam koperasi yang menjadi fokus tinjauan dan kajian oleh para insan koperasi.

Sebagai sebuah lembaga ekonomi, koperasi akan berhubungan dengan berbagai pihak. Adanya satu standar akuntansi koperasi menjadi sangatlah penting agar semua pihak yang berhubungan dengan koperasi dapat memahami kondisi keuangan koperasi secara benar. Standar yang telah disepakati bersama disebut sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adapun standar akuntansi yang sekarang berlaku untuk koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan koperasi secara profesional maka penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada suatu koperasi menjadi suatu keharusan. Namun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) No.27 tentang akuntansi perkoperasian. Namun pada tanggal 8 april 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK) atas pencabutan Pernyataan standar Akuntansi Keuangan No. 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Perkoperasian. Standar akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan

UMUM (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka pemberlakuan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP yang diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011.

Berasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti dengan judul:
“Analisis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha pada koperasi di Rokan Hilir”

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) berpengaruh terhadap perkembangan usaha pada Koperasi yang terdapat di Rokan Hilir?”.
 Hilir?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menemukan bukti empiris tentang seberapa besar kepatuhan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada koperasi yang terdapat di Rokan Hilir.
2. Untuk menemukan bukti empiris tentang kepatuhan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) berpengaruh terhadap perkembangan usaha pada Koperasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahama terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Manfaat akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan aktivitas akademik lainnya yang akan melaksanakan penelitian dengan kasus yang sama ataupun aspek lain dimasa yang akan datang.
3. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan selain bahan masukan dan pertimbangan bagi koperasi dalam membuat laporan keuangan koperasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, maka penulis akan membagi dan menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

- BAB II :** Bab ini merupakan bab telaah pustaka dan hipotesis yang berisi landasan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, kerangka konseptual dan operasinal penelitian
- BAB III :** Bab ini meliputi lokasi penelitian, sumber data, populasi penelitian, variabel dan operasional penelitian, perumusan model penelitian, teknik dan pengumpulan data, serta pengujian kualitas data.
- BAB IV :** Bab ini merupakan bab hasil penelitian sekaligus pembahasan yang meliputi pengambilan kuesioner, analisis kuantitatif, serta pengujian hipotesis.
- BAB V :** Merupakan bab terakhir dari skripsi. Penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini.